



# DIY Pecah Rekor Lagi

**JOGJA**—Menjelang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penambahan kasus harian Covid-19 di DIY terus naik. Bahkan Bumi Mataram mencatat pecah rekor penambahan kasus harian dalam dua hari berturut-turut.

Lugas Subarkah, Catur Dwi Janetti,  
& Singul Khalid  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Dalam kurun waktu dua hari, penambahan kasus Covid-19 mencetak rekor tertinggi. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 379 penambahan kasus positif pada Jumat (8/1) berdasarkan pemeriksaan pada 1.104 sampel dari 1.060 orang.

Angka itu merupakan jumlah penambahan harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di DIY pada Maret 2020. Sehari sebelumnya, penambahan juga mencatat rekor dengan satu hari ada 355 warga DIY yang positif Covid-19.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus pada Jumat didominasi dari Kabupaten Sleman (146 kasus). Setelah

▶ PPKM di Jawa dan Bali kebijakan yang tepat, walau terlambat.

▶ Mendagri mengatakan akan ada evaluasi harian-mingguan terkait dengan PPKM.

itu, Kota Jogja (109 kasus), Bantul (99), Kulonprogo (22), dan Gunungkidul (3). Sebanyak 148 kasus dinyatakan sembuh dan tujuh kasus dilaporkan meninggal dunia.

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *tracing* kasus positif 203 kasus, periksa mandiri 115 kasus, perjalanan luar daerah satu kasus, dan belum ada info 60 kasus.

Berty menambahkan ada tujuh kasus dilaporkan meninggal dunia yakni empat kasus warga Bantul, dan tiga kasus warga Sleman.

Adapun kasus dinyatakan sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja 15 kasus, Bantul 59

kasus, Kulonprogo 22 kasus, Gunungkidul 12 kasus, dan Sleman 40 kasus. Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 14.346 kasus, yang terdiri dari kasus positif meliputi 4.517 kasus aktif, 9.521 kasus sembuh, dan 308 kasus meninggal.



▶ Halaman 6

### DIY Pecah...

Sementara penggunaan *bed* di rumah sakit rujukan untuk kritikal sebanyak 56 *bed*, sisa 20 *bed*. Untuk nonkritikal digunakan 603 *bed*, sisa 49 *bed*.

Berty menyatakan dengan meningkatnya kasus di DIY akhir-akhir ini, Satgas meminta warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir (3M) harus terus dilakukan.

Kepala Social Development Studies Centre (Sodec) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Hempri Suyatna, mengatakan PPKM di Jawa dan Bali dianggap kebijakan yang tepat, walau terlambat. "Realitas yang terjadi selama ini, kontrol dan penegakan protokol kesehatan (prokes) lemah. Dan kesadaran masyarakat juga cenderung kurang dalam menjaga prokes," kata Hempri.

Saat menerapkan kebijakan PPKM, pemerintah harus tegas serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran. Di satu sisi, hal ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Akan tetapi saya kira ini risiko [ekonomi] sementara. Harapan saya kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi berbasis kesehatan harus dikedepankan," kata Hempri.

Berkaca pada pembatasan kegiatan sosial sebelumnya di beberapa daerah, Hempri berpendapat pemerintah perlu memberi sanksi tegas bagi para pelanggar. Selain itu, perlu adanya perbaikan atas komunikasi yang tidak sama antar *stakeholder* pada pembatasan sosial sebelumnya.

"Satatan penting untuk kali ini adalah bagaimana komunikasi kebijakan ini, sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan Pusat dan daerah. Termasuk koordinasi antardaerah dalam pembatasan sosial," kata Hempri.

### Evaluasi PPKM

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan ada evaluasi harian-mingguan terkait dengan PPKM.

Tito menyebut nantinya kebijakan *work from home* (WFH) 75% bisa meningkat menjadi 100% jika ada klaster di perkantoran.

"Evaluasi harian-mingguan ini kita lihat, kalau sekarang kan 75% *work from home*, masih terjadi dan klasternya di mana, klasternya kantor, bisa 100 persen," kata Tito.

Tito mengatakan apabila klaster kantor meningkat, kebijakan WFH bisa berubah menjadi 100%. Selain itu, sektor lain bisa diperketat berdasarkan hasil evaluasi.

"Kalau masalahnya *dine in* yang sekarang 25 persen dan itu *dine in* jadi penyumbang utama [klaster baru], *dine in* bisa 100 persen," ujar Tito.

Selama PPKM ini, sebut Tito, pengetatan akan berlangsung lebih keras. Mantan Kapolri itu berharap kebijakan bisa menurunkan kurva penyebaran Covid-19. "Harus melakukan langkah-langkah pengetatan yang lebih keras untuk menghilangkan interaksi sosial, kerumunan itu saya kira detail-detail sudah ada sambil membangun kapasitas. Tujuan kita adalah agar terjadi penurunan kurva. Jangan sampai melebihi kapasitas kesiapan kesehatan selama 14 hari, dimulai 11 Januari 2021," ungkapnya.

Tito menilai penurunan disiplin protokol kesehatan bukan hanya karena penegakan sanksi di daerah yang berkurang. Dia melihat ada faktor kejenuhan masyarakat.

"Faktor pertama masyarakat mungkin *take it for granted*, mungkin karena jenuh, berkepanjangan hal yang sama padahal seluruh dunia mengalami hal sama. Kedua, melihat terjadi pelanggaran-pelanggaran akhirnya jadi ikut-ikutan longgar juga. Lalai," kata Tito.

Selain itu, Tito juga menyoroti penegakan oleh petugas. Dia tak memungkiri petugas mungkin juga jenuh.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti menyatakan siap mengikuti Ingub DIY. Dia mengatakan warga Kota Jogja sudah terbiasa dengan protokol kesehatan 4M plus 1TM (tidak migrasi).

"Jogja ini penduduknya hanya 450.000 jiwa, tapi yang aktivitas [di Kota Jogja] itu hampir dua kali lipat, kurang lebih satu juta orang. Ya kita harus jaga, tidak ada orang yang pengin sakit. Sehat itu diupayakan tapi sakit itu ada penyebabnya," jelasnya.

Ditambahkan Haryadi jika masyarakat harus menaati PPKM yang berlaku dengan lebih banyak meningkatkan kualitas aktivitas di rumah. Ia menegaskan akan memberikan sanksi sosial kepada para pelanggar adalah sanksi sosial yang paling bagus. Namun dalam bentuk apa sanksi sosial tersebut ia tak menjelaskan lebih jauh.

Adapun, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DIY berharap tidak ada perpanjangan PPKM. "Kami ikut mendukung, menjalankan," ucap Ketua APPBI DIY, Surya Ananta.

Ananta mengatakan jika melihat kondisi pusat perbelanjaan beberapa waktu terakhir sebenarnya sudah menunjukkan tren yang membaik, dan diprediksi 2021 akan cerah. Adanya kebijakan PPKM akan cukup mempengaruhi kondisi, dan diprediksi menyebabkan penurunan pengunjung.

"Tetapi kami akan mengikuti aturan seperti jam operasional pukul 10.00 WIB-19.00 WIB, serta ketentuan lainnya. Kami punya harapan selesai di tanggal 25 Januari itu saja, tidak ada perpanjangan. Pemerintah juga *men-support* kami," ujarnya. (Hartambang Jati Kusumo/Detik)

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. BPBD            |              |        |                 |
| 3. Sat Pol PP      |              |        |                 |

Yogyakarta, 18 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005